KHAZANAH AKADEMIA
P-ISSN: 2580-3018 E-ISSN:2580-3034

Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Kesiswaan Dan Kepemimpinan Kepala Sekolah Terhadap Pembinaan Kesiswaan Untuk Mewujudkan Mutu Pembelajaran (Penelitian Di SMK Plus Qurrata 'Ayun Samarang Garut)

Saepul Huda
Program Studi Magister Manajemen Pendidikan Islam, Universitas Garut

Abstrak

Permasalahan yang dihadapi dalam bidang Pendidikan selama ini adalah mutu pembelajaran masih kurang optimal sehingga berdampak pada mutu pendidikan. Kurang optimalnya mutu pembelajaran diduga antara lain karena pelaksanaan kebijakan kesiswaan dan kepemimpinan kepala sekolah yang kurang maksimal terhadap pembinaan kesiswaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis tentang pengaruh pelaksanaan kebijakan kesiswaan dan kepemimpinan kepala sekolah terhadap pembinaan kesiswaan untuk mewujudkan mutu pembelajaran. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis dengan teknik survey, wawancara, observasi dan studi dukumentasi. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan untuk menjawab hipotesis penelitian ini adalah statistik dengan model analisis jalur (*path analysis)*. Adapun populasi dan sekaligus menjadi renponden dalam penelitian ini adalah guru SMK Plus Qurrata A'yun Samarang Garut sebanyak 92 orang. Hasil pengujian hipotesis utama dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kebijakan kesiswaan (X_1) dan kepemimpinan kepala sekolah (X_2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembinaan kesiswaan (Y) untuk mewujudkan mutu pembelajaran (Z) maka dilakukan pengujian diperoleh nilai F_{hitung} sebesar 43,1096 lebih besar dari nilai F_{tabel} sebesar 1,42. Dari nilai tersebut dapat ditarik kesimpulan statistik bahwa H_0 ditolak. Signifikansi nilai hasil pengujian di atas, didukung pula oleh nilai koefisien determinasi R^2 sebesar 0,6647 yang juga menunjukkan besarnya kontribusi variabel pelaksanaan kebijakan kesiswaan dan kepemimpinan kepala sekolah terhadap pembinaan kesiswaan untuk mewujudkan mutu pembelajaran sebesar 66,47 %, Sedangkan sisanya sebesar 0,3353 atau sebesar 33,53 % dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diamati dalam penelitian ini.

.

Kata Kunci: Pelaksanaan Kebijakan Kesiswaan, Kepemimpinan Kepala Sekolah.

1. Pendahuluan

Pendidikan sangat penting dan menduduki posisi sentral dalam pembangunan karena berorientasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pendidikan merupakan suatu proses transformasi nilai-nilai budaya sebagai kegiatan pewarisan budaya dari satu generasi ke generasi yang lain. Nilai-nilai kebudayaan tersebut mengalami proses transformasi dari generasi terdahulu sampai pada generasi sekarang dan ke depan. Allah SWT. berfirman:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا قِيلَ لَكُمۡ تَفَسَّحُواْ فِي ٱلۡمَجَٰلِسِ فَٱفۡسَحُواْ يَفۡسَحِ ٱللَّهُ لَكُمۡۖ وَإِذَا قِيلَ ٱنشُزُواْ فَٱنشُزُواْ يَرۡفَعِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمۡ وَٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡعِلۡمَ دَرَجَٰتٖۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعۡمَلُونَ خَبِيرٞ

"Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majlis", Maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", Maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan." (QS. Al-Mujadilah, 58:11)

Ayat tersebut mengisyaratkan bahwa ada dua faktor kemuliaan dari Allah SWT. yaitu iman dan ilmu (Hatta, 2012: 2269). Dengan perantaraan ilmu manusia bisa beriman, ilmu diperoleh melalui pendidikan, maka pendidikan merupakan hal yang sangat penting dalam rangka mengenal esensinya sebagai manusia.

Undang-undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab II, Pasal 3 menyatakan bahwa: Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Salah satu upaya untuk mewujudkan hal tersebut adalah dilaksanakannya program atau manajemen pembinaan kesiswaan yang optimal sesuai dengan kondisi dan kemampuan sekolah.

Berdasarkan hasil penelitian awal terdapat fenomena masalah dalam penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

a. Permasalahan mengenai pelaksanaan kebijakan kesiswaan.

1) Ditunjukkan dengan kurangnya komunikasi dalam menyampaikan kejelasan yaitu kebijakan yang di berikan kurang jelas dan sedikit membingungkan (ambigu/mendua) terhadap para pelaksana kebijakan.
2) Ditunjukan dengan kurangnya sumberdaya dalam implementasi kebijakan yaitu staf, keahlian staf dan kemampuan yang diperlukan.

b. Permasalahan mengenai kepemimpinan kepala sekolah.

1) Ditunjukan dengan tidak tepat sasaran perencanaan program yang sesuai yaitu antara relevansi visi sekolah dan kebutuhan sekolah yang bersifat prioritas.
2) Ditunjukan dengan kurangnya komunikasi yang efektif antara kepala sekolah dengan pengajar yang berakibat komunikasi menjadi satu arah.

c. Permasalahan mengenai pembinaan kesiswaan.

1) Ditunjukan dengan tidak meratanya internalisasi nilai kepada siswa yang berakibat sebagian siswa tidak dapat memaknai nilai-nilai keislaman.
2) Ditunjukan dengan rendahnya kebiasaan siswa menyapa baik kepada guru dan atau kepada sesama siswa serta belum menyeluruhnya pelaksanaan sholat berjamaah.

d. Permasalahan mengenai mutu pembelajaran.

1) Ditunjukan dengan tidak maksimalnya tenaga pengajar yang profesional pada penggunaan metode pembelajaran yang tepat dan tidak optimalnya program pengayaan pembelajaran.

2) Ditunjukan dengan kurang memadai fasilitas dan perlengkapan belajar pada alat peraga pembelajaran dan laboratorium sekolah.

Tabel 1. Dokumen Tata Usaha TU SMK Plus Qurrota A'yun Tahun 2019

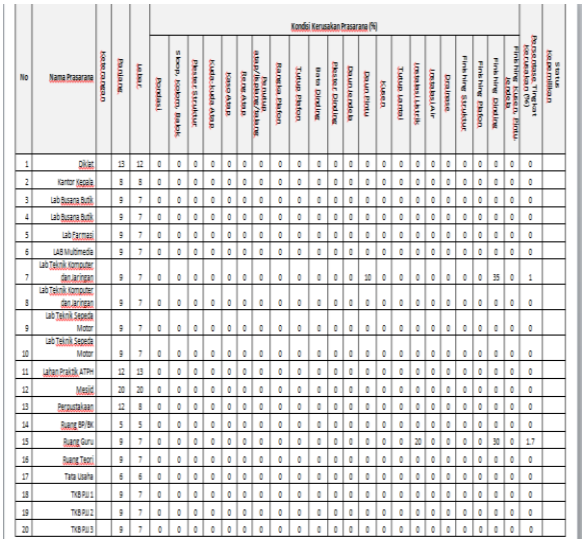

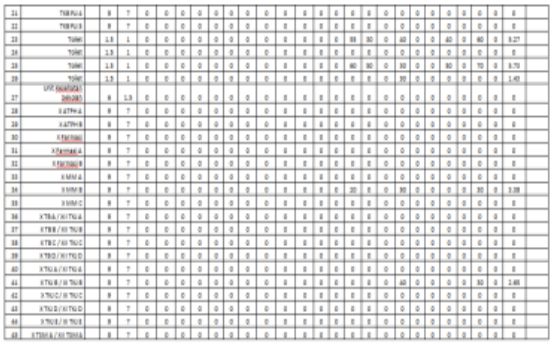

Terdapat dugaan bahwa fakta-fakta pada fenomena masalah tersebut memiliki hubungan sebab akibat (*causal effectual)* yang harus di teliti lebih jauh. Sehubungan dengan itu peneliti tertarik untuk meneliti dengan judul: **"Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Kesiswaan Dan Kepemimpinan Kepala Sekolah Terhadap Pembinaan Kesiswaan Untuk Mewujudkan Mutu Pembelajaran" (Studi kasus di SMK Plus Qurrota A'yun Samarang Garut)".**

Berdasarkan pada latar belakang penelitian tersebut di atas, maka yang menjadi pernyataan masalah (*problem statement*) dalam penelitian ini dapat di identifikasikan dalam rumusan masalah sebagai berikut : "Mutu pembelajaran belum optimal, diduga antara lain karena kurang efektifnya pembinaan kesiswaan, kurang maksimalnya kepemimpinan kepala sekolah dan pelaksanaan kebijakan kesiswaan".

Selanjutnya, berdasarkan pernyataan masalah tersebut penulis merumuskan pertanyaan masalah utama (problem question), yaitu : "Adakah pengaruh pelaksanaan kebijakan kesiswaan dan kepemimpinan kepala kekolah terhadap pembinaan kesiswaan untuk mewujudkan mutu pembelajaran ?".

Selanjutnya, mengacu pada pertanyaan masalah utama di atas penulis merumuskan sub-sub pertanyaan masalah sebagai berikut:

a. Adakah pengaruh pelaksanaan kebijakan kesiswaan terhadap pembinaan kesiswaan?
b. Adakah pengaruh pelaksanaan kebijakan kesiswaan terhadap mutu pembelajaran?
c. Adakah pengaruh kepemimpinan kepala sekolah terhadap pembinaan kesiswaan?
d. Adakah pengaruh kepemimpinan kepala sekolah terhadap mutu pembelajaran?
e. Adakah pengaruh pembinaan kesiswaan terhadap mutu pembelajaran?
f. Adakah korelasi antara pelaksnaan kebijakan kesiswaan dengan kepemimpinan kepala sekolah?

Konsepsi dan pola pikir pengembangan kebijakan dan program pembangunan pendidikan nasional berlandaskan pada paradigma nasional yaitu Pancasila dan UUD 1945. Falsafah dari sila-sila yang terkandung dalam Pancasila dan makna yang terkandung dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 yang secara instrumental dijabarkan ke dalam pasal 31 UUD 1945 menjadi landasan ideology dalam paradigma pengembangan kebijakan dan program pembangunan pendidikan nasional.

Sebagaimana telah dinyatakan pada *Problem Statement* di atas, peneliti merumuskan suatu pernyataan masalah bahwa mutu pembelajaran dalam kegiatan pembelajaran masih rendah hal ini disebabkan beberapa hal diantaranya kurangnya pelaksanaan kebijakan kesiswaan dan kepemimpinan kepala sekolah terhadap pembinaan kesiswaan belum maksimal.

Tujuan Kebijakan kesiswaan adalah mengembangkan potensi siswa secara optimal dan terpadu yang meliputi bakat, minat, dan kreativitas; memantapkan kepribadian siswa untuk mewujudkan ketahanan sekolah sebagai lingkungan pendidikan sehingga terhindar dari usaha dan pengaruh negatif dan bertentangan dengan tujuan pendidikan; mengaktualisasikan potensi siswa dalam pencapaian prestasi unggulan sesuai bakat dan minat; menyiapkan siswa agar menjadi warga masyarakat yang berakhlak mulia, demokratis, menghormati hak-hak asasi manusia dalam rangka mewujudkan masyarakat madani (civil society).

Dalam surat Al Imran ayat 159 dan hadist diatas dijelaskan bahwa abi harus bersikap lemah lembut supaya orang-orang disekitar nabi tidak menjauhinya, dan memohonkan ampunan untuk mereka, serta bermusyawarah dalam suatu urusan. Perintah untuk bermusyawarah ini merupakan dasar untuk berpartisipasi, karena dalam bermusyawarah melibatkan berbagai orang yang akan ikut berpartisipasi mengemukakan pendapatnya.

Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa partisipasi adalah keterlibatan mental dan emosi secara fisik seseorang dalam memberikan inisiatif terhadap kegiatan yang dilaksanakan dalam suatu lembaga serta mendukung pencapaian tujuan dan bertanggung jawab atas keterlibatannya. Berdasarkan uraian diatas maka partisipasi dalam kegiatan kesiswaan diartikan sebagai keterlibatan siswa baik secara fisik dan mental dalam kegiatan kesiswaan.

Adapun variabel-variabel yang akan diteliti meliputi:

a. Pelaksanaan Kebijakan Kesiswaan

Secara etimologis, kebijakan atau *policy* berasal dari bahasa Yunani, Sanskerta dan Latin. Akar kata dalam bahasa Yunani dan Sansekerta polis (negara kota) dan pur (kota) yang dikembangkan dalam bahsa Latin menjadi *politia* (negara) dan akhirnya dalam bahasaa Inggris *policy*, yang berarti menangani masalah-masalah publik atau administrasi pemerintahan (Dunn, N. William dalam Alifuddin, 2011:5).

Mintzberg dalam *(*Alifuddin, 2011:5) kebijakan merujuk pada: a) rencana atau cara bertindak yang sengaja ditetapkan; b) permainan atau maneuver yang dimaksudkan untuk menyesatkan orang lain; c) pola atau kumpulan tindakan yang konsisten, apakah bertujuan atau tidak; d) posisi atau lokasi atau wadah yang menunjuk bidang tindakan; dan e) perspektif atau cara memandang dunia (Davis, Gerald F., dkk dalam Alifuddin, 2011:5).

Ada beberapa model kebijakan yang dapat diambil untuk menjelaskan mengenai bagaimana pelaksanaan kebijakan dapat dilaksanakan dan dijalankan oleh pembuat kebijakan.

Model pelaksanaan kebijakan yang dikembangkan George C. Edward III disebut *Direct and Indirect Impact on Implementation*. Dalam pendekatan Edward III ini, terdapat empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu: 1) Komunikasi; 2) Sumber daya; 3) Disposisi; dan 4) Struktur birokrasi.

Keempat variabel tersebut juga saling berhubungan satu samalain sebagaimana pendapat Edwards III dalam (Kadi, 2008:40) yaitu sebagai berikut:

1) Komunikasi. Implemetasi kebijakan publik agar dapat mencapai keberhasilan, mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan secara jelas. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus diinformasikan kepada kelompok sasaran (*target group*) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila penyampaian tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas, tidak memberikan pemahaman atau bahkan tujuan dan sasaran kebijakan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi suatu penolakan atau resistensi dari kelompok sasaran yang bersangkutan.

2) Sumberdaya. Dalam implementasi kebijakan harus ditunjang oleh sumberdaya baik sumberdaya manusia, materi dan metoda. Sasaran, tujuan dan isi kebijakan walaupun sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif dan efisien. Tanpa sumberdaya, kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen saja tidak diwujudkan untuk memberikan pemecahan masalah yang ada di masyarakat dan upaya memberikan pelayan pada masyarakat. Selanjutnya Wahab (2010:71), menjelaskan bahwa sumberdaya tersebut dapat berwujud sumberdaya manusia, yakni kompetensi implementor dan sumberdaya finansial.

3) Disposisi. Suatu disposisi dalam implementasi dan karakteristik, sikap yang dimiliki oleh implementor kebijakan, seperti komitmen, kejujuran, komunikatif, cerdik dan sifat demokratis. Implementor baik harus memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan dan ditetapkan oleh pembuat kebijakan. Implementasi kebijakan apabila memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasinya menjadi tidak efektif dan efisien. Wahab (2010:72), menjelaskan bahwa disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, keejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan.

4) Struktur birokrasi. Organisasi, menyediakan peta sederhana untuk menunjukkan secara umum kegiatan-kegiatannya dan jarak dari puncak menunjukkan status relatifnya. Garis-garis antara berbagai posisi-posisi itu dibingkai untuk menunjukkan interaksi formal yang diterapkan. Kebanyakan peta organisasi bersifat hirarki yang menentukan hubungan antara atasan dan bawahan dan hubungan secara diagonal langsung organisasi melalui lima hal harus tergambar,

b. Kepemimpinan Kepala Sekolah

Konsep dan fungsi kepala sekolah dapat dibagi menjadi 3 bagian yaitu : a) Tugas, Peranan dan Tanggung Jawab Kepala Sekolah; b) Profil Kemampuan Kepala Sekolah Sebagai Pemimpin Pendidikan; c) Karakteristik, Integritas dan Kemandirian Kepala Sekolah. Untuk lebih jelasnya penulis akan membahasnya secara mendalam di bawah ini:

Dalam satuan pendidikan, kepala sekolah menduduki dua jabatan penting untuk bisa menjamin kelangsungan proses pendidikan sebagaimana yang telah digariskan oleh peraturan perundang-undangan. Pertama, kepala sekolah adalah pengelola pendidikan di sekolah secara keseluruhan. Kedua, kepala sekolah adalah pemimpin formal pendidikan di sekolahnya.

Revitalisasi peran kepala sekolah dalam upaya peningkatan mutu perlu segera dilaksanakan. Dengan revitalisasi itu diharapkan adanya peningkatan mutu pendidikan nasional dalam mempersiapkan bangsa Indonesia memasuki era globalisasi dan tantangan yang semakin beragam.

Dalam revitalisasi peran kepala ada dua hal yang perlu diperhatikan, yakni kegiatan dan kepemimpinan kepala sekolah yang profesional. Kedua hal tersebut tidak dapat dipisahkan. Kegiatan-kegiatan kepala sekolah harus ditunjang dengan kepemimpinan kepala sekolah yang profesional.

Kepala sekolah sebagai peran sentral di sekolah tentu mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman bagi dirinya, sehingga dapat mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia untuk memajukan sekolahnya. Di samping itu kepala sekolah tentu juga mengetahui kebutuhan sekolah khususnya input pendidikan yang akan dikembangkan dan didayagunakan dalam proses pendidikan di sekolah.

Adapun dimensi kepemimpinan kepala sekolah sebagai berikut:

a. Kemampuan personal, meliputi:

   1) Kesadaran terhadap nilai dan keyakinan diri dan orang lain.
   2) Kematangan emosional.
   3) Kesadaran akan tampak perilaku personal mereka terhadap orang lain.
   4) Menginspirasi terbentuknya iklim yang saling menghargai, saling percaya dan saling mendukung.
   5) Bersifat sabar, tekun dan teguh.
   6) Berusaha untuk tetap teratur walaupun dihadapkan pada situasi menantang dan rumit.

b. Kemampuan relasional, meliputi:

   1) Menghargai individu dan berinteraksi dengan orang lain secara menyentuh dan bermartabat.
   2) Bersikap jujur, apa adanya dan terbuka di dalam interaksi dengan orang lain.
   3) Menciptakan lingkungan kerja yang dinamis dan suportif dimana orang saling bekerja sama dan saling perhatian.
   4) Menginspirasi dan mengembangkan rasa kebersamaan dan berbagi tanggung jawab.

c. Kemampuan intelektual, meliputi:

1) Berorientasi masa depan serta dapat mempengaruhi perubahan yang memberikan keuntungan terhadap peserta didik dan komunitas sekolah.
2) Bersifat pembelajaran yang reflektif dan menciptakan situasi belajar dengan dan untuk orang lain.
3) Membangun kepemilikan bersama terhadap visi pendidikan nasional.
4) Memanfaatkan informasi penting untuk solusi yang tepat dan mengimplementasikan strategi yang berkesinambungan.
5) Menciptakan lingkungan belajar yang hidup, menantang, nyaman dan menyenangkan.
6) Mengkomunikasikan optimisme dan kepercayaan diri terhadap potensi anak di sekolahnya.
7) Terus mengkaji perkembangan pengetahuan di bidang pengajaran dan pembelajaran serta kurikulum dan penilaian.

d. Kemampuan keorganisasian, meliputi:

1) Merencanakan, mengevaluasi, mencapai dan melaporkan kinerja yang dihasilkan.
2) Mengaitkan hasil, praktik dan pengembangan profesional ke dalam konteks kinerja sekolah secara menyeluruh.
3) Memanfaatkan bukti dan umpan balik yang beragam dan luas perspektifnya dalam mengarahkan orientasi ke depan.
4) Mengembangkan, mengimplementasikan dan memonitor secara efektif dan akuntabel sistem perencanaan, manajemen dan pelaporan.

c. Pembinaan Kesiswaan

Dengan demikian, Dalam pembinaan kesiswaan terlingkup program kegiatan yang langsung melibatkan peserta didik (siswa) sebagai sasaran; ada pula program yang melibatkan guru sebagai mediasi atau sasaran antara (tidak langsung). Namun, sasaran akhir dari kinerja pembinaan kesiswaan adalah perkembangan siswa yang optimal; sesuai dengan karakteristik pribadi, tugas perkembangan, kebutuhan, bakat, minat, dan kreativitasnya. Layanan Pendidikan yang Bermutu Di Sekolah Optimalisasi Layanan: Pembinaan Kesejahteraan Siswa Manajemen/ Kepemimpinan Perkembangan pribadi siswa yang optimal dan terintegrasi Pembelajaran

Kompetensi Pembina Kesiswaan Walaupun di sekolah-sekolah telah ada wakil kepala sekolah urusan kesiswaan, akan tetapi sifatnya koordinatif dan administratif. Ia bertugas mewakili kepala sekolah dalam hal memadukan rencana serta mengkoordinasikan penyelenggaraan pembinaan kesiswaan sebagai bagian yang terpadu dari keseluruhan program pendidikan di sekolah. Pada dasarnya, pembinaan kesiswaan di sekolah merupakan tanggung jawab semua tenaga kependidikan. Guru adalah salah satu tenaga kependidikan yang kerap kali berhadapan dengan peserta didik dalam proses pendidikan. Guru sebagai pendidik bertanggungjawab atas terselenggaranya proses tersebut di sekolah, baik melalui bimbingan, pengajaran, dan atau pelatihan. Seluruh tanggung jawab itu dijalankan dalam upaya memfasilitasi peserta didik agar kompetensi dan seluruh aspek pribadinya berkembang optimal. Apabila guru hanya menjalankan salah satu bagian dari tanggung jawabnya, maka perkembangan peserta didik tidak mungkin optimal.

Manajemen adalah suatu proses pengaturan atau ketatalaksanaan untuk mencapai suatu tujuan dengan melibatkan orang lain. Manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber–sumber lainya secara efektif dan efesien untuk mencapai tujuan tertentu. Ada banyak

fungsi manajemen yang diungkapkan oleh para ahli manajemen, namun dalam materi ini akan memuat fungsi manajemen yang lebih sederhana dan bersifat menyeluruh oleh George R. Terry, yakni POAC (Planning, Organizing, Actuating & Controlling) (Yogarananda, 2012:1).

Adapun dimensi dari variabel pembinaan kesiswaan adalah sebagai berikut:

a. Dimensi Perencanan Penciptaan Suasana Religius

Dalam setiap pembinaan pasti perlu Perencanaan sebagai langkah awal dalam melakukan pembinaan. perencanaan merupakan penyusunan langkah-langkah secara sistematik dan teratur untuk mencapai tujuan organisasi atau memecahkan masalah tertentu. Perencanaan juga diartikan sebagai upaya memanfaatkan sumber-sumber yang tersedia dengan memperhatikan segala keterbatasan guna mencapai tujuan secara efisien dan efektif. Perencanaan merupakan langkah awal dalam proses manajemen, karena dengan merencanakan aktivitas organisasi kedepan, maka segala sumber daya dalam organisasi difokuskan pada pencapaian tujuan organisasi (Yogarananda, 2012:2).

b. Dimensi Internalisasi Nilai

Internalisasi nilai merupakan proses penanam nilai melalui sistem aturan organisasi yaitu pada varibel pembinaan kesiswaan. Pengorganisasian dapat diartikan sebagai kegiatan pembagian tugas-tugas pada orang yang terlibat dalam aktivitas organisasi, sesuai dengan kompetensi SDM yang dimiliki. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kegiatan ini merupakan keseluruhan proses memilih orang-orang serta mengalokasikannya sarana dan prasarana untuk menunjang tugas orang-orang itu dalam organisasi, serta mengatur mekanisme kerjanya sehingga dapat menjamin pencapaian tujuan program dan tujuan organisasi. Menurut George R. Terry, tugas pengorganisasian adalah mengharmonisasikan kelompok orang yang berbeda, mempertemukan macam-macam kepentingan dan memanfaatkan seluruh kemampuan kesuatu arah tertentu (Rahmat, 2013:27-28).

c. Dimensi Keteladanan (Pelaksanaan Pembinaan)

Sebuah perencanaan dan pengorganisasian yang kurang baik berarti bila tidak diikuti dengan pelaksanaan kerja organisasi yang bertanggung jawab. Untuk itu maka semua sumber daya manusia (SDM) yang ada harus dioptimalkan untuk mencapai visi, misi dan program kerja organisasi. Pelaksanaan kerja harus sejalan dengan rencana kerja yang telah disusun. Setiap pelaku organisasi harus bekerja sesuai dengan tugas, fungsi dan peran, keahlian dan kompetensi masing-masing SDM untuk mencapai visi, misi dan program kerja organisasi yang telah ditetapkan. Inti dari *Actuating* adalah menggerakkan semua anggota kelompok untuk bekerja agar mencapai tujuan organisasi (Yogarananda, 2012:3).

d. Dimensi Pembiasaan Pembinaan Kesiswaan

Menurut Dr Badruzaman M.A bahwa pembiasaan merupakan suatu konsep islam, pembiasaan berasal dari bahasa arab *lita'ziz* yaitu membiasakan diri yang sudah terkristalilasi terhadap nilai-nilai keislaman.nMenurut Asmaun Sahlan Varibel Pembinaan Kesiswaan pada dimensi pembiasaan memiliki indikator sebagai berikut :

1) Menyapa
2) Sholat berjamaah

3) Tadarus
4) Istighosah

e. Dimensi pembentukan sikap dan perilaku

Agar pekerjaan berjalan sesuai dengan tujuan organisasi dan program kerja maka dibutuhkan pengontrolan, baik dalam bentuk pengawasan, inspeksi hingga audit. Kata-kata tersebut memang memiliki makna yang berbeda, tapi yang terpenting adalah bagaimana sejak dini dapat diketahui penyimpangan-penyimpangan yang terjadi, baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan maupun pengorganisasian. Sehingga dengan hal tersebut dapat segera dilakukan antisipasi, koreksi dan penyesuaian-penyesuaian sesuai dengan situasi, kondisi dan perkembangan lingkungan sekitar organisasi (Yogarananda, 2012:5).

d. Mutu Pembelajaran

Istilah kualitas atau mutu perlu memperoleh pengkajian yang cermat dan hati-hati sebab menurut Anna Coote dalam Edwar Salis yang dikutip oleh Dadang Suhardan (2010 : 94) mengatakan : *"Quality is a slippery concept. It implies different things to deffernt people".* Kualitas adalah sebuah konsep yang dapat membingungkan, pengertiannya menjadi sesuatu yang berbeda bagi setiap orang. Bahkan para ahli pun menyimpulkannya tidak ada yang sama. Definisi kualitas berbeda-beda.

Kualitas dapat didefinisikan sebagai sesuatu yang melebihi kepuasan dan keinginan consume. Menurut Juran yang dikutip oleh Dadang Suhardan (2010 : 94) kualitas adalah produk yang memiliki keistimewaan, membebaskan konsumen dari rasa kecewa akibat kegagalan. Produk adalah kesesuaian dengan tujuan atau manfaatnya. Kualitas adalah kesesuaian dengan kebutuhan pelanggan, kualitas harus dapat memenuhi kebutuhan pelanggan sekarang dan dimasa datang. Perbedaan pengertian seperti dikemukakan, menyebabkan kita perlu memahaminya dengan sungguh-sungguh supaya mendapat gambaran yang jelas.

Adapun dimensi mutu pembelajaran menurut Taksonomi Bloom dkk yang dikutip oleh Harjanto (2000 : 59) ada tiga kategori tujuan yakni ranah kognitif/penalaran atau *cognitive domain* , ranah afektif/nilai dan sikap atau *"affective domain"* dan ranah psikomotor atau *psychomotor domain.*

a. Ranah Kognitif

Menurut Harjanto (2000 : 59) ranah kognitif meliputi enam sub ranah yang disusun mulai dari yang paling sederhana sampai kepada yang paling kompleks.

b. Ranah afektif

Menurut Harjanto (2000 : 62) ranah nilai dan sikap atau *affective domain* meliputi lima sub ranah yang tersusun dari tahap yang paling sederhana sampai tahap yang paling kompleks.

c. Ranah Psikomotorik

Ranah psikomotorik atau *psychomotor domain* menurut Harjanto (2000 : 63) meliputi tujuh sub ranah dari yang paling rendah sampai pada yang paling tinggi atau kompleks.

Bedasarkan hal tersebut, maka nampak jelas adanya hubungan ***Causal Effectual*** antara variabel, bahwa pelaksanaan kebijakan kesiswaan dan kepemimpinan kepala sekolah sangat berpengaruh terhadap pembinaan kesiswaan dalam mewujudkan mutu pembelajaran.

Selanjutnya sehubungan dengan proposisi tersebut yang menjadi anggapan dasar penelitian ini adalah:

1) Mutu Pembelajaran yang baik akan terwujud apabila pembinaan kesiswaan dilaksanakan secara maksimal.
2) Pembinaan kesiswaan yang sesuai dengan harapan akan menentukan terwujudnya mutu pembelajaran.
3) Pembinaan kesiswaan akan maksimal apabila adanya pengaruh kepemimpinan kepala sekolah dan pelaksanaan kebijakan kesiswaan yang dilaksanakan secara optimal.

Berdasarkan proposisi dan anggapan dasar tersebut, maka kerangka pemikiran dalam pemikiran ini dapat digambarkan ke dalam model penelitian sebagai berikut:

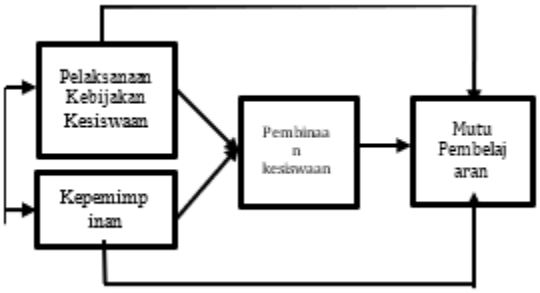

Gambar 1. Model Penelitian

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah diuraikan diatas, maka hipotesis penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

Hipotesis utama:

H_0 **:** Tidak terdapat pengaruh pelaksanaan kebijakan kesiswaan dan kepemimpinan kepala sekolah terhadap pembinaan kesiswaan untuk mewujudkan mutu pembelajaran.

H_1 **:** Terdapat pengaruh pelaksanaan kebijakan kesiswaan dan kepemimpinan kepala sekolah terhadap pembinaan kesiswaan untuk mewujudkan mutu pembelajaran

Selanjutnya dari rumusan hipotesis utama yang akan diajukan dalam penelitian ini, dapat dijabarkan dalam sub-sub hipotesis sebagai berikut:

Sub Hipotesis 1:

H_0 : Tidak terdapat pengaruh pelaksanaan kebijakan kesiswaan terhadap Pembinaan kesiswaan.

H_1 : Terdapat pengaruh pelaksanaan kebijakan kesiswaan terhadap pembinaan kesiswaan.

Sub Hipotesis 2:

H_0 : Tidak terdapat pengaruh pelaksanaan kebijakan kesiswaan terhadap mutu pembelajaran.
H_1 : Terdapat pengaruh pelaksanaan kebijakan kesiswaan terhadap mutu pembelajaran.

Sub Hipotesis 3:

H_0 : Tidak terdapat pengaruh kepemimpinan kepala sekolah terhadap pembinaan kesiswaan.
H_1 : Terdapat pengaruh kepemimpinan kepala sekolah terhadap pembinaan kesiswaan.

Sub Hipotesis 4:

H_0 : Tidak terdapat pengaruh epemimpinan kepala sekolah terhadap mutu pembelajaran.
H_1 : Terdapat pengaruh kepemimpinan kepala sekolah terhadap mutu pembelajaran.

Sub Hipotesis 5:

H_0 : Tidak terdapat pengaruh pembinaan kesiswaan terhadap mutu pembelajaran.
H_1 : Terdapat pengaruh pembinaan kesiswaan terhadap mutu pembelajaran.

Sub Hipotesis 6:

H_0 : Tidak terdapat korelasi antara pelaksanaan kebijakan kesiswaan dengan kepemimpinan kepala sekolah.
H_1 : Terdapat korelasi antara pelaksanaan kebijakan kesiswaan dengan kepemimpinan kepala sekolah.

2. Metode

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Adapun yang dimaksud dengan metode deskriptif adalah metode yang menggambarkan atau memaparkan fenomena masalah yang akan diteliti pada saat ini atau keadaan sekarang dengan tujuan mencari jawaban tentang pemecahan masalah dan hasilnya dilaksanakan setelah kegiatan eksploratif (Iskandar, 2018:174).

Teknik penelitian ini menggunakan teknik sensus, yaitu penelitian mengambil semua dari suatu populasi dengan menggunakan kuosioner sebagai alat pengumpulan data yang pokok untuk mengkaji gejala atau fenomena yang diamati.

Dengan demikian metode pendekatan dan teknik penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, diharapkan dapat memberikan jawaban terhadap pemecahan masalah melalui pengumpulan informasi data lapangan yang menggambarkan faktor-faktor yang berhubungan antara fenomena yang diteliti, yaitu mengenai pelaksanaan kebijakan kesiswaan, kepemimpinan kepala sekolah, pembinaan kesiswaan, dalam hubungannya dengan kualitas belajar Siswa.

Alat ukur penelitian adalah penghubung antara masalah penelitian yang dirumuskan secara teoritik dengan data yang dikumpulkan melalui pengamatan empirik (Iskandar,2018: 10). Alat ukur yang digunakan dalam kegiatan penelitian ini adalah angket berupa kuesioner terstruktur

yang bersifat tertutup dimana responden hanya tinggal memilih salah satu jawaban yang sudah tersedia dengan memberikan tanda sesuai petunjuk.

Jenis data yang ditangkap dalam penelitian ini yaitu berupa data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang mendekati kebenaran dan data tersebut sifatnya valid yang mencakup data variabel-variabel penelitian yang diperoleh langsung dari responden, dalam hal ini adalah guru-guru SMK Plus Qurrata 'Ayun Samarang Garut. Sumber data primer ini diantaranya diperoleh dari responden sebanyak 92 orang sebagai objek penelitian sesuai ruang lingkup dan kebutuhan.

Sedangkan data sekunder yaitu data yang peroleh dari dokumen-dokumen dan laporan-laporan yang berkaitan dengan masalah penelitian, bisa berupa pendapat atau pandangan dari pihak lain selain responden atau bisa berupa dokumen-dokumen yang berkaitan dengan variabel penelitian serta laporan-laporan yang berkaitan erat dengan objek penelitian.

3. Hasil Pengujian dan Pembahasan

3.1 Pelaksanaa Kebijakan Kesiswaan (X1) Dan Kepemimpinan Kepala Sekolah (X2) Terhadap Pembinaan Kesiswaan (Y) Untuk Mewujudkan Mutu Pembelajaran (Z)

Rumusan hipotesis yang diajukan peneliti dalam penelitian ini adalah:

Hipotesis utama:

H_0 **:** Tidak terdapat pengaruh pelaksanaan kebijakan kesiswaan dan kepemimpinan kepala sekolah terhadap pembinaan kesiswaan untuk mewujudkan mutu pembelajaran.

H_1 **:** Terdapat pengaruh pelaksanaan kebijakan kesiswaan dan kepemimpinan kepala sekolah terhadap pembinaan kesiswaan untuk mewujudkan mutu pembelajaran

Untuk menjawab hipotesis yang diajukan tersebut, maka dilakukan pengujian, yaitu dengan diperoleh nilai Fhitung > Ftabel yaitu Fhitung 43,1096 > Ftabel 1,4201 dengan nilai koefisien jalur 0,8139 nilai koefisien determinasi 0,6647 dengan demikian keputusan yang didapat H0 ditolak dan H1 diterima.

Dengan demikian pelaksanan kebijakan kesiswaan dan kepemimpinan kepala sekolah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembinaan kesiswaan untuk mewujudkan mutu pembelajaran sebesar 0,6647 atau sebesar 66,4% sedangkan sisanya sebesar 0,3353 atau 33,53% (epsilon) dipengaruhi oleh variabel lain seperti interaksi pelaksana, iklim organisasi, lingkungan eksternal dan faktor lainnya.

3.2 Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Kesiswaan (X1) terhadap Pembinaan Kesiswaan (Y)

Rumusan hipotesis yang diajukan peneliti dalam penelitian ini adalah:

H_0 : Tidak terdapat pengaruh pelaksanaan kebijakan kesiswaan terhadap Pembinaan kesiswaan.

H_1 : Terdapat pengaruh pelaksanaan kebijakan kesiswaan terhadap pembinaan kesiswaan.

Untuk menjawab hipotesis yang diajukan tersebut, maka dilakukan pengujian, yaitu dengan diperoleh nilai Thitung > Ttabel yaitu Thitung 0,4449 > Ttabel 1,9873 dengan nilai koefisien jalur

0,0475 nilai koefisien determinasi 0,0022 dengan demikian keputusan yang didapat H0 diterima dan H1 ditolak.

Dengan demikian Variabel pelaksanaan kebijakan kesiswaan memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pembinaan kesiswaan sebesar 0,0022 atau 0,22%.sedangkan sisanya 0,9978 atau 99,78% dipengaruhi oleh variabel lain di luar variabel pelaksanaan kebijakan kesiswaan . Faktor lain (epsilon) yang diduga berpengaruh : Iklim organisasi, motivasi belajar siswa.

3.3 Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Kesiswaan (X1) terhadap Mutu Pembelajaran(Z)

Rumusan hipotesis yang diajukan peneliti dalam penelitian ini adalah:

H_0 : Tidak terdapat pengaruh pelaksanaan kebijakan kesiswaan terhadap mutu pembelajaran.
H_1 : Terdapat pengaruh pelaksanaan kebijakan kesiswaan terhadap mutu pembelajaran.

Untuk menjawab hipotesis yang diajukan tersebut, maka dilakukan pengujian, yaitu dengan diperoleh nilai Thitung > Ttabel yaitu Thitung 0,4031 > Ttabel 1,9876 dengan nilai koefisien jalur 0.6122 nilai koefisien determinasi 0,0009dengan demikian keputusan yang didapat H0 diterima dan H1 ditolak.

Dengan demikian Pelaksanaan kebijakan kesiswaan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap variabel mutu pembelajaran sebesar 0,0009 atau sebesar 0,009%. . Sedangkan sisanya sebesar 0,991 atau sebesar 99,1% (Epsilon) dipengaruhi oleh variabel lain di luar variabel yang tidak dimasukan ke dalam model. Faktor lain (epsilon) yang diduga berpengaruh : Kinerja Guru, Manajemen Pembelajaran

3.4 Pengaruh Kepemimpinan Kepala Sekolah (X2) terhadap Pembinaan Kesiswaan (Y)

Rumusan hipotesis yang diajukan peneliti dalam penelitian ini adalah:

H_0 : Tidak terdapat pengaruh kepemimpinan kepala sekolah terhadap pembinaan kesiswaan.
H_1 : Terdapat pengaruh kepemimpinan kepala sekolah terhadap pembinaan kesiswaan.

Untuk menjawab hipotesis yang diajukan tersebut, maka dilakukan pengujian, yaitu dengan diperoleh nilai Thitung < Ttabel yaitu Thitung 0,2004 < Ttabel 1.9873 dengan nilai koefisien jalur 0.0214 nilai koefisien determinasi 0,0005 dengan demikian keputusan yang didapat H0 diterima dan H1 ditolak.

Dengan demikian kepemimpinan kepala sekolah berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pembinaan kesiswaan sebesar 0,0005 atau sebesar 0,005%sedangkan sisanya (Epsilon) sebesar 0,996 atau sebesar 99,6% dipengaruhi oleh variabel lain di luar variabel yang tidak dimasukan ke dalam model. Faktor lain (epsilon) yang diduga berpengaruh : Kepemimpinan kepala sekolah dan guru, situasi dan kondisi sekolah, lingkungan keluarga

3.5 Pengaruh Kepemimpinan Kepala Sekolah (X2) terhadap Mutu Pembelajaran (Z)

Rumusan hipotesis yang diajukan peneliti dalam penelitian ini adalah*:*

H_0 : Tidak terdapat pengaruh epemimpinan kepala sekolah terhadap mutu pembelajaran.
H_1 : Terdapat pengaruh kepemimpinan kepala sekolah terhadap mutu pembelajaran.

Untuk menjawab hipotesis yang diajukan tersebut, maka dilakukan pengujian, yaitu dengan diperoleh nilai Thitung < Ttabel yaitu Thitung -2,8125 < Ttabel 1.9876 dengan nilai koefisien jalur 0.1020 nilai koefisien determinasi 0,0104 dengan demikian keputusan yang didapat H0 diterima dan H1 ditolak.

Dengan demikian kepemimpinan kepala sekolah berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap mutu pembelajaran sebesar 0,0104 atau sebesar 1,04%sedangkan sisanya (Epsilon) sebesar 0,9911atau sebesar 99,11% dipengaruhi oleh variabel lain di luar variabel yang tidak dimasukan ke dalam model. Faktor lain (epsilon) yang diduga berpengaruh : Kinerja guru, kompetensi profesionalisme guru.

3.6 Pengaruh Pembinaan Kesiswaan (Y) terhadap Mutu Pembelajaran (Z)

Rumusan hipotesis yang diajukan peneliti dalam penelitian ini adalah:

H_0 : Tidak terdapat pengaruh pembinaan kesiswaan terhadap mutu pembelajaran.
H_1 : Terdapat pengaruh pembinaan kesiswaan terhadap mutu pembelajaran.

Untuk menjawab hipotesis yang diajukan tersebut, maka dilakukan pengujian, yaitu dengan diperoleh nilai Thitung > Ttabel yaitu Thitung 8,8274 > Ttabel 1.9876 dengan nilai koefisien jalur 0.9424 nilai koefisien determinasi 0,8881 dengan demikian keputusan yang didapat H0 ditolak dan H1 diterima.

Dengan demikian Pembinaan kesiswaan berpengaruh positif dan sangat signifikan terhadap mutu pembelajaran sebesar 0,8881 atau sebesar 88,81%sedangkan sisanya (Epsilon) sebesar 0,0017atau sebesar 0,017% dipengaruhi oleh variabel lain di luar variabel yang tidak dimasukan ke dalam model. Faktor lain (epsilon) yang diduga berpengaruh : Komunikasi interpersonal, motivasi belajar siswa, prestasi belajar siswa.

3.7 Hubungan Pelaksanaan Kebijakan Kesiswaan (X1) dengan Kepemimpinan Kepala Sekolah (X2)

Rumusan hipotesis yang diajukan peneliti dalam penelitian ini adalah:

H_0 : Tidak terdapat korelasi antara pelaksanaan kebijakan kesiswaan dengan kepemimpinan kepala sekolah.
H_1 : Terdapat korelasi antara pelaksanaan kebijakan kesiswaan dengan kepemimpinan kepala sekolah.

Untuk menjawab hipotesis yang diajukan tersebut, maka dilakukan pengujian, yaitu dengan diperoleh nilai Thitung < Ttabel yaitu Thitung -0,8182 < Ttabel 1,9867dengan nilai koefisien korelasi parsial 0,0859 dengan demikian keputusan yang didapat H0 diterimadan H1 ditolak.

Dengan demikian Untuk mengetahui lebih lanjut kerterkaitan antara variabel X_1 dan X2, maka dilakukan pengujian, yaitu dengan melihat perbandingan antara t_{hitung} dan t_{tabel} yaitu t_{hitung} = -0,8182 < t_{tabel} 1,9867. Dari nilai tersebut diperoleh keputusan H_0 diterima, sehingga tidak terdapat hubungan antara pelaksanaan kebijakan kesiswaan dan kepemimpinan kepala sekolah.

4. Simpulan

Hasil pengujian hipotesis utama dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kebijakan kesiswaaan dan kepemimpinan kepala sekolah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembinaan kesiswaan untuk mewujudkan mutu pembelajaran. Hal ini diperlihatkan oleh besaran nilai koefisien determinansi berdasarkan hasil perhitungan.

Pertama, hasil analisis deskripsi variabel pelaksanaan kebijakan kesiswaan menunjukan kriteria sangat baik, hal ini dibuktikan dengan rata-rata jawaban responden mengenai variabel tersebut. Indikator dengan nilai persentase tertinggi yaitu kepala sekolah, bidang kesiswaan dan BK memiliki sikap spiritual. Persentase terendah yaitu guru dan siswa mendapatkan anggaran yang sesuai dengan kebutuhan dan pimpinan menyediakan ruangan yang memadai.

Kedua, hasil analisis deskripsi variabel kepemimpinan kepala sekolah menunjukan kriteria cukup baik, hal ini dibuktikan dengan rata-rata jawaban responden mengenai variabel tersebut. Indikator dengan nilai persentase tertinggi yaitu Anggaran ditetapkan sesuai kebutuhannya. Persentase terendah yaitu Komunikasi disampaikan secara menyeluruh dan optimal oleh pimpinan.

Ketiga, hasil analisis deskripsi variabel pembinaan kesiswaan menunjukan kriteria baik, hal ini dibuktikan dengan rata-rata jawaban responden mengenai variabel tersebut. Indikator dengan nilai persentase tertinggi yaitu Siswa bersikap baik kepada orang lain. Persentase terendah yaitu Siswa berkata santun kepada orang lain.

Keempat, hasil analisis deskripsi variabel mutu pembelajaran kriteria baik, hal ini dibuktikan dengan rata-rata jawaban responden mengenai variabel tersebut. Indikator dengan nilai persentase tertinggi yaitu Guru menentukan KKM. Persentase terendah yaitu guru menggunakan metode pembelajaran yang tepat.

Daftar Pustaka

I. Buku

Al-Qur'an dan Terjemahnya. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemahan/Pentafsir Al-Qur'an,

Al Bukhari, Muhammad bin Isma'il, Abi Abdillah. *Matan Al-Bukhari.* Semarang: Toha Putra, t.t.

Aminatul, zahran, *Membangun kualitas pembelajaran melalui dimensi profesionalisme guru*, 2015: 140-150)

Andang. *Manajemen & Kepemimpinan Kepala Sekolah.* Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014.

Ash-Shabuni, Ali. *Shafwatu At-Tafasir.* Kairo: Dar El-Fikr, t.t.

Barnawi. *Kinerja Guru Profesional.* Jogjakarta: Ar-ruzz Media, 2012.

Djihad, Suyanto dan Asep. *Calon Guru dan Guru Profesional.* Yogyakarta: Multi Pressindo, 2012.

Effendy, Onong Uchjana. *Ilmu Filsafat dan Teori Komunikasi.* Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.

Haryono, Rudy. *Kamus Lengkap 30 Trilyun (Inggris-Indonesia / Indonesia-Inggris).* Jombang: Lintas Media Jombang, 2014.

Iskandar, Jusman. *Indeks dan Skala Dalam Penelitian.* Bandung: Puspaga, 2015.

J, Rakhmat. *Teori-teori Komunikasi.* Bandung: Remaja Karya, 2005.

Kosasi, Soetjipto dan Raflis. *Profesi Keguruan.* Jakarta: Rineka Cipta, 2000.

Mulyasa. *Menjadi Kepala Sekolah Profesional.* Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007.
Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia.* Jakarta: Balai Pustaka, 2007.
Purwanto. *Evaluasi Hasil Belajar.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
Purwanto, Ngalim. *Administrasi dan Supervisi Pendidik.* Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004.
Syagala, Saiful. *Kemampuan Profesional Guru dan Tenaga Kependidikan.* Bandung: CV. Alfabeta, 2011.
Syagala, Saeful. *Manajemen Strategik dalam Peningkatan Mutu Pendidikan.*Bandung: Alfabeta, 2012
Sudjana, Nana. *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar.* Bandung: PT. Rosdakarya, 2011.
Sukmadinata, Nana Syaodih. *Metode Penelitian Pendidikan.* Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2005.
Suprijono, Agus. *Cooperative Learning.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
Suranto, A.W. *Komunikasi Interpersonal.* Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
Undang-undang RI Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen. n.d.
Yunus, Mahmud. *Kamus Arab-Indonesia.* Jakaarta: PT. Hidakarya Agung, 2012.

II. Dokumen-dokumen

Permendiknas Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan.mProfil SMK Plus Qurrata ‘Ayun Samarang Garut.